

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Hilirisasi Produk Unit Mikro, Kecil, dan Menengah

Dwi Maryani Rispatiningsih¹, Lery Prasetyo², Sulaiman³, Marjianto⁴, Ari Mariyono⁵, Eko Siswoyo⁶, Mugiyo⁷, Ayuning Wulan⁸

dwimaryani@radenwijaya.ac.id¹, leryprasetyo@rocketmail.com²,
sulaiman@radenwijaya.ac.id³, antonmarjianto@gmail.com⁴, arimariyono16@gmail.com⁵,
eko@radenwijaya.ac.id⁶, aressamugiyo@gmail.com⁷

1,2,3,4,5,6,7,8 Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Keywords:
Community development, Disability, Empowerment, Micro, small, and medium enterprise, Product

Abstract: This community engagement project aims to describe the empowerment of persons with disabilities through the downstreaming of MSME (Micro, Small, and Medium Enterprise) products in Wonogiri Regency. The primary issues identified include the low level of participation of persons with disabilities in productive economic activities and the suboptimal implementation of inclusive MSME downstreaming. The project employed the Asset-Based Community Development (ABCD) approach. The findings indicate that persons with disabilities possess significant potential to engage in various downstreaming stages, such as packaging, product finishing, basic design, and digital marketing. Nevertheless, structural, cultural, and technical barriers continue to impede their full integration. This project proposes an inclusive empowerment model based on MSME downstreaming that integrates competency-based training, continuous mentoring, adaptive facilities, and collaboration among MSMEs, local government, and disability communities. These findings are expected to serve as policy recommendations for strengthening inclusive economic development in Wonogiri Regency.

Pendahuluan

Pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan inklusif yang bertujuan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelatihan, modal usaha, teknologi, dan peluang pasar. Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Wonogiri, isu-isu seperti minimnya dukungan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta stigma sosial kerap menjadi penghambat utama partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi produktif.

Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu daerah dengan perkembangan UMKM yang dinamis memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam sektor

ekonomi lokal. UMKM Wonogiri berkembang dalam berbagai bidang seperti pangan olahan, batik, kerajinan kayu, tekstil, serta produk-produk rumah tangga. Namun potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan karena sebagian besar pelaku UMKM masih berada pada tahap produksi konvensional dengan nilai tambah yang rendah. Hilirisasi produk mulai dari pengolahan lanjutan, standarisasi kualitas, inovasi desain, pengemasan modern, hingga pemasaran digital merupakan strategi kunci untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar regional, nasional, maupun global.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses hilirisasi UMKM bukan hanya memungkinkan memperoleh penghasilan yang lebih stabil, tetapi juga dapat memperkuat rantai nilai UMKM secara menyeluruh. Keterampilan yang dimiliki penyandang disabilitas, seperti kerajinan tangan, keahlian menjahit, kepekaan artistik, atau keterampilan teknologi dasar, dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pendampingan yang terstruktur. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketika penyandang disabilitas diberikan akses pada pelatihan berbasis kompetensi, fasilitas kerja ramah disabilitas, serta jejaring pemasaran, produktivitas meningkat signifikan. Namun, ekosistem pemberdayaan seperti ini masih belum terbentuk secara optimal di Kabupaten Wonogiri.

Selain faktor internal seperti keterampilan dan motivasi, penyandang disabilitas juga membutuhkan dukungan eksternal berupa kebijakan daerah, kolaborasi antarinstansi, serta keterlibatan komunitas dan pelaku usaha. Program pemberdayaan yang ada saat ini masih bersifat parsial, belum terintegrasi, dan cenderung berfokus pada keterampilan dasar tanpa menghubungkannya dengan rantai hilirisasi UMKM. Hal ini menyebabkan banyak penyandang disabilitas yang telah mengikuti pelatihan tidak dapat melanjutkan ke tahap produksi bernilai tambah atau pemasaran. Di sisi lain, pelaku UMKM juga masih minim informasi tentang potensi dan kontribusi penyandang disabilitas dalam kegiatan usaha, sehingga kolaborasi antara keduanya belum berkembang secara optimal.

Permasalahan utama yang kemudian muncul adalah bagaimana merancang model pemberdayaan yang mampu menghubungkan penyandang disabilitas dengan kebutuhan hilirisasi UMKM melalui mekanisme kolaboratif, berkelanjutan, dan sesuai karakteristik lokal Wonogiri. Diperlukan pemetaan potensi penyandang disabilitas, identifikasi kebutuhan pelaku UMKM, serta analisis kebijakan daerah yang mendukung terciptanya ekosistem inklusif. Penelitian terdahulu tentang pemberdayaan disabilitas dalam konteks UMKM masih terbatas

pada peningkatan keterampilan dasar, belum banyak yang mengkaji hilirisasi sebagai strategi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat posisi tawar penyandang disabilitas dalam pasar kerja maupun dunia usaha.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana merancang dan menerapkan model pemberdayaan yang tepat agar penyandang disabilitas di Kabupaten Wonogiri dapat terlibat secara aktif dalam proses hilirisasi produk UMKM. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas disabilitas, lembaga pendidikan, serta pelaku UMKM untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang inklusif. Selain itu, diperlukan pengabdian yang dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual, potensi, serta tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam konteks hilirisasi produk UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, bertujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas melalui hilirisasi produk UMKM di Kabupaten Wonogiri, dan menawarkan model pemberdayaan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Metode

Metode yang digunakan pada program pengabdian ini menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) atau Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset menekankan pada pemberdayaan dengan memanfaatkan kekuatan yang sudah ada untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ABCD mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada yang dimiliki oleh komunitas masyarakat di sekitarnya (Kretzmann & McKnight, 1993; Green & Haines, 2016). Di Kabupaten Wonogiri, pengabdian masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang ada, terutama dalam hal hilirisasi produk UMKM disabilitas. Ada potensi untuk dikembangkan dalam hal pemasaran dan branding, pelatihan inovasi produk, peningkatan kualitas, dan diversifikasi produk. Selain itu, elemen hukum dan perizinan mengurus legalitas produk agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Menurut Mathie & Cunningham (2008), ada lima tahapan yang diperlukan untuk menerapkan pendekatan ABCD untuk pendampingan pengabdian agar mendapatkan hasil yang optimal:

1. Penemuan (*Discovery of Community Assets*).

Penemuan aset komunitas dilakukan melalui pemetaan aset komunitas, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki. Melakukan diskusi, pendalaman, dan diskusi tentang potensi yang ada terkait dengan produk UMKM disabilitas, serta hasil turunannya, bersama dengan komunitas atau masyarakat setempat.

2. Impian (Merancang Misi Bersama).

Komunitas harus menetapkan tujuan dan visi setelah menemukan aset. Langkah ini mencakup meneliti aspirasi dan harapan masyarakat dengan menggunakan pendekatan *Appreciative Inquiry*, yang berfokus pada keberhasilan masa lalu dan prediksi masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini, tim pengabdian masyarakat dan komunitas dampingan menyamakan persepsi dan merumuskan tujuan bersama untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan hilirisasi produk UMKM untuk mencapai tujuan jangka panjang yang memungkinkan bersaing di pasar domestik dan internasional.

3. Desain (Perancangan Program Berbasis Aset).

Tahap ini mencakup: a. Membangun program pengabdian masyarakat berdasarkan aset yang telah diidentifikasi; b. Membangun kemitraan antara komunitas, akademisi, pemerintah, dan sektor swasta; dan c. Membangun strategi implementasi yang berbasis pada partisipasi komunitas. Pada titik ini, pembangunan rencana keberlanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya bergantung pada dukungan eksternal tetapi juga dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat juga mengandeng pihak yang sangat berkompeten di bidang hilirisasi produk untuk menjamin kesesuaian perancangan dan pelaksanaan program.

4. Pelaksanaan (Pelaksanaan Program):

Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat membantu komunitas berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Dalam fase ini, prinsip utama adalah sebagai berikut: a. Memotivasi masyarakat untuk menjadi pelaku utama perubahan; b. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan; dan c. Untuk mencapai hasil yang optimal, gunakan metode berbasis aksi dan kerja sama.

5. Sustain (Keberlanjutan Program)

Penekanan pada tahap ini adalah keberlanjutan dapat dicapai dengan membangun kolaborasi yang kuat dan memberikan komunitas kemampuan untuk terus mengelola dan mengembangkan program secara mandiri. Dalam hal ini, tim pengabdian masyarakat terus berusaha untuk memastikan bahwa program pemberdayaan UMKM melalui hilirisasi

produk dapat diawasi dan didampingi sampai tujuan bersama tercapai. Sehingga program pengabdian masyarakat dapat tumbuh dan berlanjut di Kabupaten Wonogiri, transfer pengetahuan dan kepemimpinan sangat penting.

Pembahasan

Pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Wonogiri masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Keterbatasan akses pelatihan, kurangnya fasilitas kerja adaptif, serta minimnya dukungan berkelanjutan menjadi faktor penghambat utama. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia cenderung bersifat sporadis, tidak terintegrasi, dan belum berbasis kebutuhan pasar (Agustina & Prasetyo, 2021). Kondisi ini juga terlihat pada pelatihan yang diselenggarakan di Wonogiri, yang lebih berfokus pada keterampilan dasar tanpa adanya tahapan lanjutan menuju peluang kerja nyata.

Di sisi lain, UMKM di Wonogiri memiliki potensi besar untuk menjadi wadah pemberdayaan penyandang disabilitas. UMKM merupakan sektor yang mendominasi struktur ekonomi lokal di banyak daerah Indonesia dan terbukti efektif menyerap tenaga kerja, termasuk kelompok rentan (*Badan Pusat Statistik Profil UMKM Indonesia*, 2023). Namun, sebagian besar UMKM di Wonogiri masih berada pada tahap produksi dasar dan belum mengoptimalkan hilirisasi produk. Padahal, hilirisasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat branding, dan memperluas akses pasar (Kurniasih & Widodo, 2020).

Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas masih bekerja di sektor informal, berpendidikan rendah, dan memiliki akses terbatas terhadap fasilitas ekonomi. Selama ini, bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah dan lembaga sosial cenderung berfokus pada pelatihan keterampilan dasar seperti menjahit, membatik, kerajinan tangan, dan pengolahan makanan sederhana. Namun, pelatihan tersebut belum mampu menciptakan perubahan signifikan karena tidak diikuti dengan tahap lanjutan berupa penyediaan alat produksi, pembentukan usaha berkelanjutan, jejaring pemasaran, atau integrasi ke dalam rantai nilai UMKM lokal.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Kepada Subjek Dampingan

Penyandang disabilitas memiliki potensi yang sangat relevan dengan tahapan hilirisasi. Kemampuan ketelitian, kreativitas, serta motivasi kemandirian merupakan modal sosial yang penting untuk proses pengemasan, finishing produk, pelabelan, hingga pemasaran digital (Wulandari, 2022). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara optimal apabila diberikan lingkungan kerja inklusif dan pendampingan yang sesuai kebutuhan (Setiawan & Mulyani, 2022). Bahkan, dalam konteks transformasi digital UMKM, penyandang disabilitas terbukti dapat dilibatkan sebagai admin media sosial, pengelola marketplace, serta pembuat konten visual sederhana (Cahyono, 2020).

Hambatan terbesar pemberdayaan di Wonogiri berasal dari aspek kelembagaan dan budaya masyarakat. Fasilitas produksi UMKM jarang yang dirancang ramah disabilitas, sehingga mobilitas dan produktivitas penyandang disabilitas menjadi terbatas. Selain itu, stigma masyarakat mengenai kemampuan kerja penyandang disabilitas masih cukup kuat dan mengurangi peluang rekrutmen oleh pelaku UMKM (Sukardi, 2020). Aspek ini sejalan dengan temuan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (2022) bahwa penyandang disabilitas di Indonesia masih lebih sering dipersepsikan sebagai objek bantuan daripada subjek pembangunan.

Meski demikian, terdapat peluang yang sangat besar untuk membangun model pemberdayaan yang mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam rantai nilai UMKM.

Pelaku UMKM di Wonogiri menunjukkan minat terhadap kerja sama apabila ada pendampingan dan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah. Model pemberdayaan yang ideal adalah model yang memadukan pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan berkesinambungan, fasilitas produksi adaptif, dan integrasi digitalisasi pemasaran (Yulianto & Putri, 2021). Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan inklusif yang menekankan kolaborasi multisektor dalam menciptakan kesempatan ekonomi setara (Cahyono, 2020). Dengan demikian, pemberdayaan penyandang disabilitas melalui hilirisasi UMKM di Kabupaten Wonogiri sangat potensial, tetapi memerlukan desain model yang terencana, terstruktur, dan kolaboratif. Perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, organisasi disabilitas, dan masyarakat agar pemberdayaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menghasilkan dampak yang signifikan bagi kualitas hidup penyandang disabilitas.

Pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Wonogiri masih menghadapi berbagai tantangan struktural, sosial, dan ekonomi yang cukup kompleks. Meskipun pemerintah daerah telah menyediakan beberapa program pelatihan, seperti keterampilan menjahit, kerajinan tangan, dan pengolahan makanan sederhana, program-program tersebut belum terintegrasi secara menyeluruh dengan kebutuhan UMKM lokal maupun proses hilirisasi produk. Akibatnya, penyandang disabilitas cenderung mengalami kesulitan dalam menerapkan keterampilan yang diperoleh menjadi praktik ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan (Agustina & Prasetyo, 2021) yang menyatakan bahwa program pemberdayaan disabilitas di Indonesia seringkali bersifat parsial, tidak terstruktur, dan kurang berbasis kebutuhan pasar, sehingga dampaknya terhadap kemandirian ekonomi penyandang disabilitas relatif terbatas.

Di sisi lain, UMKM di Kabupaten Wonogiri memiliki potensi besar untuk dijadikan sarana pemberdayaan. Data dari (*Badan Pusat Statistik Profil UMKM Indonesia, 2023*) menunjukkan bahwa UMKM mendominasi struktur ekonomi lokal dan menjadi sektor yang fleksibel dalam penyerapan tenaga kerja, termasuk kelompok rentan. Namun, sebagian besar UMKM masih berada pada tahap produksi dasar dengan nilai tambah yang rendah, sehingga kurang mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi secara optimal. Hilirisasi produk, yang meliputi pengolahan lanjutan, pengemasan modern, branding, dan pemasaran digital, menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah UMKM (Kurniasih & Widodo, 2020). Pada titik ini, penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk berkontribusi

dalam berbagai tahapan produksi, terutama yang membutuhkan ketelitian, konsistensi, kreativitas, dan keterampilan digital dasar.

Penyandang disabilitas memiliki sejumlah potensi yang relevan dengan proses hilirisasi UMKM. Beberapa penyandang disabilitas menunjukkan kemampuan tinggi dalam pekerjaan manual seperti *finishing* produk, pengemasan, penyortiran, dan pelabelan. Selain itu, kemampuan dalam desain sederhana dan pemasaran digital melalui platform online juga menjadi peluang besar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterampilan manual dan kemampuan digital dasar merupakan modal penting bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam sektor ekonomi kreatif (Hardianto, 2021). Dengan dukungan yang tepat, para penyandang dapat menjadi bagian dari proses produksi UMKM yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga meningkatkan kualitas produk.

Hambatan utama pemberdayaan penyandang disabilitas masih berasal dari aspek struktural dan kultural. Sebagian besar fasilitas produksi UMKM belum dirancang ramah disabilitas, seperti ketiadaan meja kerja adaptif, ramp akses, atau pencahayaan yang memadai. Selain itu, stigma masyarakat mengenai kemampuan kerja penyandang disabilitas masih cukup kuat, sehingga peluang diterima sebagai tenaga kerja terbatas (Sukardi, 2020). Faktor keluarga yang bersikap protektif juga menjadi hambatan tersendiri karena mengurangi kesempatan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, 2022). Hambatan teknis, seperti literasi digital yang beragam, kurangnya akses alat bantu, dan minimnya pendampingan berkelanjutan, juga mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan.

Meskipun demikian, terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui hilirisasi produk UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dapat diintegrasikan dalam proses produksi melalui skema kerja fleksibel, kontrak borongan, atau produksi berbasis rumah. Strategi ini sejalan dengan konsep pembangunan inklusif, yang menekankan perlunya kolaborasi multisektor untuk menciptakan kesempatan ekonomi setara (Cahyono, 2020).

Secara ekonomi, pemberdayaan penyandang disabilitas melalui hilirisasi UMKM dapat meningkatkan pendapatan individu, memperkuat rantai nilai UMKM, dan mendorong diversifikasi produk. Misalnya, penyandang disabilitas yang terampil dalam kerajinan tangan

dapat berkontribusi pada produksi aksesoris atau souvenir, sementara yang memiliki kemampuan digital dapat mengelola pemasaran online dan administrasi penjualan. Secara sosial, keterlibatan dalam aktivitas produktif meningkatkan rasa percaya diri, memperluas jejaring sosial, dan mengurangi stigma yang melekat pada penyandang disabilitas. Secara kelembagaan, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk membangun kebijakan ekonomi inklusif dan memperkuat sinergi antara UMKM, komunitas penyandang disabilitas, dan lembaga pendamping (Setiawan & Mulyani, 2022).

Lebih jauh, model pemberdayaan berbasis hilirisasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menekankan hak setara dalam memperoleh pekerjaan dan akses ekonomi. Integrasi penyandang disabilitas dalam UMKM tidak hanya memperluas kesempatan ekonomi tetapi juga mendukung terciptanya pembangunan inklusif yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Wonogiri berpotensi menjadi contoh daerah yang mampu memberdayakan penyandang disabilitas melalui penguatan UMKM dan hilirisasi produk.

Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas melalui hilirisasi produk UMKM memiliki dampak multidimensional: meningkatkan kemandirian ekonomi, mengurangi stigma sosial, dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Namun, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan, perencanaan strategis, serta dukungan fasilitas dan kebijakan yang inklusif. Oleh karena itu, penyusunan model pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi penyandang disabilitas sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Wonogiri.

Untuk mewujudkan pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan, merekomendasikan model pemberdayaan berbasis hilirisasi yang meliputi beberapa unsur penting. Pertama, pemetaan potensi penyandang disabilitas harus dilakukan secara sistematis untuk mengetahui keterampilan, minat, dan kondisi fisik. Kedua, pelatihan keterampilan harus disesuaikan dengan kebutuhan UMKM dan diarahkan pada proses hilirisasi seperti pengemasan, finishing, atau pemasaran digital. Ketiga, penyandang disabilitas perlu diintegrasikan secara langsung ke dalam rantai nilai produksi UMKM melalui skema kerja fleksibel, kontrak borongan, atau produksi berbasis rumah. Keempat, pendampingan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan penyandang disabilitas mampu mempertahankan produktivitas dan adaptasi

kerja. Kelima, pemerintah perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti alat produksi, akses pembiayaan, ruang kerja inklusif, dan pelatihan digital. Terakhir, strategi pemasaran digital harus dijadikan fondasi utama untuk memperluas jangkauan produk UMKM dan memastikan keberlanjutan usaha.

Kesimpulan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan dan pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta kepercayaan diri penyandang disabilitas dalam mengelola dan mengembangkan produk UMKM yang bernilai tambah dan berdaya saing. Hilirisasi produk terbukti menjadi strategi efektif dalam memperluas akses pasar, meningkatkan nilai jual produk, serta memperkuat keberlanjutan usaha yang dijalankan. Selain itu, kegiatan ini mendorong terwujudnya pemberdayaan yang inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga menciptakan sinergi antara masyarakat, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi penyandang disabilitas, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Wonogiri. Penyandang disabilitas memiliki potensi keterampilan yang relevan dengan tahapan hilirisasi, seperti pengemasan, *finishing* produk, dan pemasaran digital. Namun, hambatan struktural, kultural, serta minimnya kebijakan inklusif membuat integrasi ini belum optimal. Dengan penerapan model pemberdayaan inklusif berbasis hilirisasi yang terencana, kolaboratif, dan berkelanjutan, penyandang disabilitas dapat berperan signifikan dalam memperkuat daya saing UMKM sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi.

Daftar Pustaka

- Agustina, R., & Prasetyo, B. (2021) Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan berbasis komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 8(2), pp. 143–158.
- Badan Pusat Statistik Profil UMKM Indonesia (2023). Jakarta.
- Cahyono, A. (2020). Pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 11(1). pp. 55–68.
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. (2022). Data dan Informasi Penyandang Disabilitas Indonesia. *Kementerian Sosial RI* [Preprint].
- Green, G.P. and Haines, A. (2016). *Asset Building & Community Development*. thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. doi:10.4135/9781483398631.
- Hardianto, T. (2021) 'Partisipasi penyandang disabilitas dalam ekonomi kreatif di Indonesia', *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(1), pp. 22–37.

- Kretzmann, J.P. and Mcknight, J.L. (1993). *Building Communities From The Inside Out*. chicago: DePaul University.
- Kurniasih, D., & Widodo, S. (2020). Konsep hilirisasi UMKM dalam meningkatkan daya saing produk lokal', *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(3), pp. 211–220.
- Mathie, A. and Cunningham, G. (2008). *From clients to citizens: Communities changing the course of their own development, Development in Practice*. United Kingdom: Practical Action Publishing.
- Setiawan, A., & Mulyani, M. (2022). Peluang kerja penyandang disabilitas dalam era digital: Perspektif ekonomi inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial Modern*, 15(2), pp. 99–112.
- Sukardi. (2020). Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis inklusi sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*. 5(4). pp. 301–315.
- Wulandari, E. (2022). Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi UMKM. *Jurnal Pembangunan Daerah*. 14(2). pp. 87–102.
- Yulianto, B., & Putri, N. (2021). Kolaborasi multisektor dalam pengembangan UMKM inklusif. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*. 3(2). pp. 75–89.

